



Postur APBD DIY 2021

Menyusut Rp2 T

■ Pemda DIY Fokuskan Pengentasan Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki impian besar menurunkan indeks gini ratio atau angka ketimpangan sosial sebanyak 3,5 persen di 2021 mendatang. Namun, hal ini menjadi pekerjaan yang sangat berat lantaran belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk 2021 menurun sekitar Rp2 triliun dari tahun 2020 sebanyak Rp6,48 triliun.

Saat ini belanja APBD DIY 2021 hanya di angka Rp4,11 triliun. Proses harmonisasi dan penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pun sudah disepakai antara legislatif dan eksekutif.

Melihat postur anggaran yang kian menyusut, sangat mustahil lantaran adanya pandemi Covid-19 sejak Maret lalu sampai sekarang tentu cukup menjadi pekerjaan yang berat bagi pemerintah DIY untuk memulihkan ekonomi.

Tugas menurunkan indeks gini ratio sebesar 3,5 itu pun menjadi berat.

Untuk upayanya di 2021, kami akan fokus untuk prioritas pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi, karena kontraksi ekonomi kami negatif. 2021 targetnya bisa sampai 5 persen.

Namun demikian, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji, sangat optimis hal itu bisa tercapai.

"Untuk upayanya di 2021, kami akan fokus untuk prioritas pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi, karena kontraksi ekonomi kami negatif. 2021 targetnya bisa sampai 5 persen. Termasuk gilirannya saat ini 4 persen, kami optimis bisa di tekan 3,5 persen di 2021," katanya, Rabu (14/10).

Aji, sapaan akrabnya ini menambahkan, memang 2021 pembangunan proyek tol Yogyakarta-Solo sudah dimulai. Namun, hal itu tidak akan cukup untuk memangkas angka ketimpangan sosial-ekonomi seluruh

wilayah di DIY.

Ia mengatakan, beberapa program khusus telah disiapkan pada 2021 mendatang. Aji menyebut jika APBD 2021 nanti akan lebih pro terhadap rakyat. Dukungan terhadap pelaku UMKM, dan usaha-usaha kecil dalam industri perdagangan akan digenot.

"Program-program kami di APBD 2021 ini proporsinya untuk rakyat kalangan bawah. Ya kayak dukungan UMKM dan pelaku-pelaku usaha," imbuhnya.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, sebelumnya menandatangani, butuh terobosan untuk menangani problem kemiskinan yang hingga kini belum selesai sepenuhnya. "Permasalahan kota sekarang ini menyangkut ketimpangan ekonomi dan masalah kemiskinan. Gini ratio kita masih cukup tinggi dan angka kemiskinan ada potensi bertambah seiring pandemi Covid-19," ujarnya.

Tingginya angka gini ratio yang kini mencapai 0,423 menjadi warning karena masih terdapat sekat lebar antara si kaya dan si miskin di Kota Yogyakarta. Alhasil, inovasi yang melibatkan lintas OPD pun sangat dibutuhkan, karena hal tersebut juga sangat berkaitan dengan angka kemiskinan. (hda/aka)

ANGGARAN MEMURUH

- Belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk 2021 menurun sekitar Rp2 triliun dari tahun 2020 sebanyak Rp6,48 triliun. Atau, di angka Rp4,11 triliun.
- Terdiri dari belanja operasional sebesar Rp3,6 triliun, belanja modal sebesar Rp145 miliar, belanja tak terduga sebesar Rp66,9 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp759 miliar.
- Pendapatan daerah sebesar Rp1,7 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp2,7 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah senilai Rp7,5 miliar.
- Anggaran penanganan Covid-19 bertambah Rp7 miliar.

Kepala

Tu

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Desember 2020
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005